

KESENJANGAN PERSEPSI DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PERENCANAAN WILAYAH DI KOTA SIBOLGA

Enita Sarumpaet¹, Marihot Manullang², Marto Silalahi³, Jasman Purba⁴

Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota
Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, serta persepsi masyarakat di kota sibolga. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah: (1) observasi, (2) wawancara, (3) questioner/angket dan (4) dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis kuantitatif. Hasil analisis dampak sosial di kota sibolga sangat membawa dampak positif bagi perubahan sosial dan peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan setelah adanya perusahaan banyak sarana pendidikan yang dulunya tidak ada sekarang menjadi ada. Keamanan, sebelum adanya tidak pernah terjadi perkelahian massal, hal ini dibuktikan dengan keseluruhan responden menyatakan tidak pernah terjadi perkelahian massal, setelah adanya perusahaan sebanyak 17,5% responden menyatakan pernah terjadi perkelahian massal. Terjadi peningkatan intensitas interaksi antara sebelum dan sesudah adanya perusahaan, peningkatan yang terjadi sangat besar sehingga dapat disimpulkan tingkat interaksi masyarakat di kota Sibolga sangat baik. Tingkat gotong royong di Kota Sibolga mengalami penurunan yang sangat besar, ketika sebelum adanya perusahaan masyarakat sekitar selalu mengadakan gotong royong. Namun setelah adanya perusahaan masyarakat menjadi jarang melakukan gotong royong jadi dalam hal ini perusahaan membawa dampak negatif terhadap tingkat gotong royong di Kota Sibolga. Pembangunan pertanian yang berbasis perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sehingga terjadi suatu perubahan dalam pola hidup masyarakat disekitarnya serta menghilangkan kemiskinan dan keterbelakangan khususnya di daerah pedesaan, disamping itu juga memperhatikan pemerataan perekonomian antar golongan dan antar wilayah, kebijaksanaan pemerintah.

Kata Kunci: Kesenjangan Persepsi, Masyarakat, Indikator Pembangunan

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the level of socio-economic welfare of the community, as well as people's perceptions in the city of Sibolga. The research method used in this study is a quantitative method. While the techniques used in data collection are: (1) observation, (2) interviews, (3) questionnaires and (4) documentation. Furthermore, the data analysis technique used is quantitative analysis. The results of the analysis of social impacts in the city of Sibolga have a very positive impact on social change and improving the community's economy. This is evidenced by the fact that after the existence of the company, many educational facilities that did not exist before are now available. Security, before there was never a mass fight, this is evidenced by all respondents stating that there had never been a mass fight, after the existence of a company as much as 17.5% of respondents stated that there had been a mass fight. There was an increase in the intensity of interaction between before and after the existence of the company, the increase that occurred was very large so that it can be concluded that the level of community interaction in the city of Sibolga was very good. The level of gotong royong in Sibolga City has experienced a very large decline, when before the existence of the



company the surrounding community always held mutual cooperation. However, after the existence of the company, the community rarely did mutual cooperation, so in this case the company had a negative impact on the level of mutual cooperation in Sibolga City. Plantation-based agricultural development aims to improve the welfare of the community so that there is a change in the lifestyle of the surrounding community and eliminate poverty and underdevelopment, especially in rural areas, while also paying attention to economic equity between groups and between regions, government policies.

Keywords: Perception Gap, Community, Development Indicators

PENDAHULUAN

Pembangunan menurut (Tikso, 2005) diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Pembangunan seringkali juga menjadi semacam ideology of developmentalism. Kesadaran suatu bangsa yang terbentuk melalui pengalamannya, baik pengalaman sukses maupun kegagalan yang dialami amat menentukan interpretasi mereka tentang pembangunan. Melalui proses itu, timbullah pergeseran - pergeseran paradigma pembangunan merentang dari paradigma pertumbuhan atau paradigma ekonomi murni, paradigma kesejahteraan, paradigma neo ekonomi, paradigma dependensia sampai keparadigma pembangunan manusia (Tjokrowinoto, 1996).

Paradigma pembangunan ini berhasil meningkatkan akumulasi kapital dan pendapatan perkapita negaranegara berkembang. Namun keberhasilan paradigma ini menyebabkan dampak negatif, hal ini dikarenakan momentum pembangunan dicapai dengan pengorbanan deteorisasi ekologis berupa penyusutan sumberdaya alam, timbulnya kesenjangan sosial, dan dependensi. Dampak negatif yang terjadi terus mengalami akumulasi sehingga menimbulkan permasalahan - permasalahan baru. Berdasarkan hal tersebut, maka tercetuslah konsep pembangunan yang mencoba menyeimbangkan sektor - sektor pembangunan, konsep tersebut dinamakan sustainable development (pembangunan berkelanjutan).

(Rustiadi *et al.*, 2009) menegaskan bahwa di masa sekarang dan yang akan datang diperlukan adanya pendekatan perencanaan wilayah yang berbasis pada hal - hal berikut : sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melakukan perubahan atau upaya untuk mencegah terjadinya perubahan yang diinginkan, menciptakan keseimbangan pembangunan antar wilayah, menciptakan keseimbangan pemanfaatan sumberdaya di masa sekarang dan masa yang akan datang (pembangunan berkelanjutan), dan disesuaikan dengan kapasitas pemerintah dan masyarakat untuk mengimplementasikan perencanaan yang disusun.

Menurut Brutland Report dalam sidang PBB tahun 1987, pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan awal munculnya konsep pembangunan berkelanjutan disebabkan oleh perhatian yang besar kepada lingkungan. Terutama sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, karena di sisi lain eksploitasi terhadapnya dilakukan secara terus menerus. Semua ini agar tidak mengurangi dan mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Sehingga



pembangunan yang dilakukan di masa sekarang itu jangan sampai merusak lingkungan, boros terhadap SDA, dan juga memperhatikan generasi yang akan datang. Sebagai katalisator dan monitoring terhadap tercapainya prinsip pembangunan berkelanjutan, maka haruslah ada indikator - indikator untuk mengukurnya (Rustiadi *et al.*, 2009) mengartikan bahwa indikator merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa hari demi hari organisasi atau program yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Ada beberapa indikator untuk menilai pembangunan berkelanjutan di suatu negara/kota. Hal ini seperti yang terdapat dalam Buku *Indicators of Sustainable Development : Guidelines and Methodologies - third edition* (United Nation Publicity, 2007) yang menyebutkan bahwa indikator penilaian keberlanjutan tersebut (yang dikeluarkan oleh *Commission on Sustainable Development, United Nations*) terdiri dari 14 tema utama dengan 44 sub tema, 50 indikator utama dan 46 indikator lain.

Penelitian yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan telah banyak dilakukan. (Purnomo, 2002) melakukan pengkajian terhadap penerapan dari model persamaan struktural dalam melihat keterkaitan antar indikator pembangunan berkelanjutan di Pulau Jawa dan Luar Jawa. Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa keberlanjutan dan ketidakberlanjutan pembangunan tergantung terhadap kondisi sumberdaya manusia-nya. Lain halnya dengan yang dilakukan (Nurmalasari, 2003) yang menerapkan metode analisis Procrustes dan autokorelasi spasial dalam melihat hubungan jarak kota dengan indikator pembangunan berkelanjutan yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Adapun hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa autokorelasi spasial mempunyai indikasi yang negatif terhadap sebagian besar pencapaian indikator pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian tentang pembangunan berkelanjutan dan pencapaian indikator-indikatornya di luar negeri, dilakukan oleh (Doody *et al.*, 2008) yang menerapkan *Q - method* sebagai metoda partisipasi publik dalam pemilihan indikator pembangunan berkelanjutan. *Q - method* digunakan untuk mengkombinasikan opini publik dengan keahlian teknis dalam menghasilkan daftar indikator yang relevan terhadap publik. Metode ini terdiri dari kumpulan pernyataan, analisis pernyataan tersebut, *Q - sort* dan analisis *Q - sort*. Hasil dari penelitian ini yaitu daftar pernyataan dan kerangka kerja yang efektif tentang indikator keberlanjutan dari para ahli berbagai bidang yang dikombinasikan dengan persepsi masyarakat yang disesuaikan dengan manfaat yang didapat sesuai kehidupan masyarakat sehari - hari. Sedangkan (Counsell & Haughton, 2006) dalam penelitian yang lain menyebutkan bahwa penilaian keberlanjutan (*sustainability appraisal*) merupakan suatu teknik untuk mencapai tujuan dari ‘pembangunan berkelanjutan’ dalam suatu perencanaan wilayah. Penilaian keberlanjutan sekarang telah dipadukan dengan proses perencanaan wilayah dan bahkan prakteknya, hal ini merupakan refleksi dari perhatian pemerintah terhadap regulasi perencanaan menurut pandangan masing-masing terhadap pembangunan berkelanjutan.



Kota Sibolga adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Pantai Barat pulau Sumatera dimana pada bagian utara, selatan dan timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, sedangkan bagian barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Jumlah penduduk Kota Sibolga saat ini sebanyak 96.249 jiwa yang tersebar pada 4 (empat) Kecamatan dan 17 (tujuh belas) Kelurahan dengan luas wilayah secara keseluruhan 2.778 hektar, yang terdiri dari wilayah daratan seluas 1.077 hektar atau 30.45% dan wilayah lautan 1.706 hektar atau 61.4% dengan kepadatan penduduk Kota Sibolga sebesar 8.937 jiwa/km² Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kota Sibolga selama kurun waktu sepuluh Tahun (Tahun 2005 - 2015) yaitu sebesar 2.41 % tiap tahunnya. Laju pertumbuhan yang relatif besar ini merupakan suatu hal yang harus diantisipasi mengingat luas lahan Kota Sibolga hanya 1.077 Ha.

Hal ini menunjukkan bagaimana padatnya Kota Sibolga dengan jumlah penduduk sebanyak itu. Penggunaan lahan yang tadinya ruang terbuka hijau menjadi kawasan permukiman, pertokoan, dll. Peningkatan jumlah penduduk dapat menambah tekanan pada sumberdaya dan memperlambat peningkatan taraf hidup di daerah - daerah yang kemelaratan sudah tersebar luas. Meskipun masalahnya bukanlah semata-mata jumlah penduduk namun adalah distribusi sumberdaya; pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai bila pembangunan demografi selaras dengan perubahan potensi produktif ekosistem (WCED, 1987).

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk bukan hanya merupakan modal akan tetapi penduduk dapat menjadi beban pembangunan apabila tidak diarahkan kepada peningkatan kualitas sumberdaya manusianya.

Tabel 1
Perkembangan dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kota Sibolga Tahun 2010 – 2015

Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun(%)
	2010	2014	2015	2010-2015
1 Sibolga Utara	19 970	21 289	21 604	8,18
2 Sibolga Kota	14 304	14 133	14 080	- 1,57
3 Sibolga Selatan	30 082	30 385	30 439	1,19
4 Sibolga Sambas	20 125	20 359	20 396	1,35
Sibolga	84 481	86 166	86 519	2,41

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Sibolga, 2017

Sesuai dengan visi pembangunan Kota Sibolga untuk 5 tahun ke depan (2016 - 2021) yaitu **“Mewujudkan Rakyat Sibolga yang Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing”**, tentu saja untuk mewujudkan visi tersebut, Kota Sibolga harus memperhatikan indikator pembangunan wilayah, dimana salah satu indikatornya adalah aspek ekonomi.

Aspek ekonomi adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan indikator pembangunan wilayah. Diantara berbagai indikator ekonomi, indikator mengenai pendapatan masyarakat di suatu wilayah merupakan indikator yang terpenting. Salah satu ukuran produktivitas wilayah yang paling umum dan paling diterima secara luas sebagai standar ukuran pembangunan dalam skala wilayah dan negara yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau *Gross Domestic Product (GDP)*.



Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sibolga dalam *Buku tentang PDRB Kota Sibolga menurut Lapangan Usaha 2011 - 2016* menyebutkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Sibolga tahun 2016 mengalami penurunan dibanding tahun 2011 yaitu pada tahun 2011 mencapai 5,62 % sedangkan pada tahun 2016 sebesar 5,15% (Tabel 2). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan atau pertumbuhan riil perekonomian, atau dapat menggambarkan kinerja pembangunan dari suatu periode ke periode sebelumnya.

Tabel 2
Laju pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha di Kota Sibolga
Tahun 2011 s/d 2016

Kategori PDRB	[Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.71	4.19	4.33	3.71	4.78	3.27
B. Pertambangan dan Penggalian	2.06	2.37	3.02	3.17	3.44	3.32
C. Industri Pengolahan	5.51	4.57	4.09	4.02	4.95	5.49
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4.96	4.91	5.17	7.92	7.78	6.61
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.13	5.57	5.38	5.97	5.31	5.33
F. Konstruksi	5.19	5	5.61	5.18	5.69	5.94
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.35	7.64	7.28	8	6.45	6.61
H. Transportasi dan Pergudangan	7.75	5.52	6.27	5.86	6.38	6.49
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.71	6.23	5.68	5.55	6.65	6.76
J. Informasi dan Komunikasi	9.69	8.97	7.87	7.32	3.25	3.88
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	6.82	7.38	6.80	4.79	4.93	5.09
L. Real Estate	4.04	5.39	6.51	5.93	4.29	5.56
M,N. Jasa Perusahaan	5.43	4.61	4.56	5.21	4.83	5.54
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.42	5.84	5.42	7.30	7.35	2
P. Jasa Pendidikan	4.57	4.74	7.93	6.24	5.04	5.66
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.53	7.86	10.56	6.10	1.97	4.18
R,S,T,U. Jasa lainnya	5.23	6.43	5.72	5.47	1.35	1.81
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.62	5.75	5.96	5.84	5.65	5.15

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Sibolga Tahun 2017

Pada dasarnya Kota Sibolga memiliki sumber daya alam yang terbatas, namun demikian kondisi alam yang ada menjadi salah satu modal dasar dalam pembangunan disamping sumber daya manusia. Kondisi alam yang dimiliki tetap dipertahankan agar tidak mengalami degradasi kualitasnya yang tentu akan merugikan Kota Sibolga di masa yang akan datang.

Menurut rancangan buku resume RPJMD Kota Sibolga Tahun 2016-2021, kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam hal ini sungai di Kota Sibolga kondisinya semakin memprihatinkan, terutama pada pemukiman - pemukiman padat di sepanjang



bantaran sungai. Masyarakat Kota Sibolga banyak yang masih membuang sampah dan tinja ke sungai. Kondisi tersebut merupakan salah satu penyebab banjir pada musim hujan, dimana baru - baru ini banjir yang melanda Kota Sibolga menimbulkan korban jiwa.

Terkait dengan pembangunan perkotaan, maka kota yang menganut paradigma pembangunan berkelanjutan dalam rencana tata ruangnya merupakan suatu kota yang nyaman bagi penghuninya, dimana akses ekonomi dan sosial budaya terbuka luas bagi setiap warganya untuk memenuhi kebutuhan dasar maupun kebutuhan interaksi sosial warganya serta kedekatan dengan lingkungannya.

Konsep kota yang berkelanjutan haruslah sudah dipikirkan oleh segenap pelaku pembangunan yang terlibat dalam pembangunan perkotaan. Kota harus berkembang terus secara berkelanjutan, melalui saling kebergantungan dan saling mendukung secara resiprokal antara elemen alam dan elemen buatan manusia. Untuk mewujudkan impian menjadi kota yang berkelanjutan, maka persepsi dan pemahaman segenap pelaku pembangunan termasuk masyarakat tentang prinsip pembangunan berkelanjutan itu sendiri haruslah sama. Apabila prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipahami oleh pelaku pembangunan dengan proses perencanaan partisipatif atau bersama-sama, maka dokumen perencanaan yang merupakan hasil penyusunan bersama pelaku pembangunan pun akan terjiwai oleh prinsip pembangunan berkelanjutan. Tercapainya prinsip pembangunan berkelanjutan pada suatu daerah dapat diukur melalui ketercapaian indikator pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut.

Oleh sebab itu maka penelitian yang akan dilakukan merupakan upaya dalam mengidentifikasi sejauhmana persepsi *stakeholder* dan masyarakat di Kota Sibolga sebagai pelaku pembangunan mengenai pembangunan berkelanjutan serta mengkaji pencapaian indikator pembangunan berkelanjutan di Kota Sibolga. Penelitian ini juga akan melihat sejauhmana prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjiwai terhadap dokumen perencanaan wilayah yang telah ada.

Dari penelitian tersebut diharapkan dapat menganalisis apakah terjadi kesenjangan/*gap* antara persepsi *stakeholder* dan masyarakat tentang pembangunan berkelanjutan, ketercapaian indikator pembangunan berkelanjutan eksisting serta dokumen perencanaan wilayah yang telah dihasilkan dari Kota Sibolga. Oleh sebab itu peneliti untuk melakukan penelitian tentang “Kesenjangan Persepsi dan Pemahaman Indikator Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan Wilayah di Kota Sibolga” .

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode survei. Berdasarkan kutipan (Kerlinger, 1997); (Sugiyono, 2013) mengemukakan bahwa penelitian survei adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, atau pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sample yang diambil dari populasi tertentu, teknik pengumpulan data dengan pengamatan (wawancara atau kuesioner) yang tidak mendalam, dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Persepsi *Stakeholder* Dan Masyarakat Di Kota Sibolga Tentang Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Persepsi adalah pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulan yang diterima oleh panca indera, sehingga merupakan sesuatu yang berarti. Hasil persepsi terhadap stimulus dapat berbeda antara individu yang satu dengan yang lain. Persepsi dipengaruhi oleh perasaan, kemampuan berpikir serta pengalaman individu yang berbeda satu dengan yang lain (Daviddoff,1981 dalam Sagala,2009).

Persepsi dan Pemahaman *Stakeholder* di Kota Sibolga tentang Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Stakeholder dipilih berdasarkan metode pengambilan sampelpurposif yang merupakan sampel non - probabilitas. Selanjutnya *stakeholder* yang terpilih tersebut akan disebut sebagai *informan*. Sampel tersebut diambil berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang dipilih mempunyai kredibilitas dalam bidangnya, peduli terhadap perkembangan di Kota Sibolga, berlatar belakang pendidikan yang tinggi serta dianggap mempunyai pemahaman terhadap kuisisioner yang akan diajukan. Jumlah informan yaitu 7 (tujuh) orang yang berasal dari pemerintahan dan non pemerintahan. Adapun karakteristik informan yang dipilih dapat dilihat pada Tabel di bawah ini

Tabel 3 Karakteristik Informan

No.	Pekerjaan	Asal Instansi/lembaga/Jabatan	Usia Informan	Pendidikan Terakhir
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Setda Kota Sibolga / Kepala Bagian	48 tahun	Pasca Sarjana
2.	Pensiunan	Tokoh Masyarakat	591 tahun	Sarjana
3.	Praktisi	Konsultan / Tenaga Ahli	39 tahun	Pasca Sarjana
4.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Bappeda Kota Sibolga/ Kepala Bidang	40 tahun	Sarjana
5.	Dosen	STIE Wasliyah	37 tahun	Pasca Sarjana
6.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Bappeda Kota Sibolga/ Kepala Bidang	36 tahun	Sarjana
7.	Anggota Dewan	DPRD Kota Sibolga/ Anggota Komisi	45 tahun	Sarjana

Sumber : Hasil Survey,2017.

Persepsi dan Pemahaman Informan tentang Substansi Bagian Kedua

Proses hirarki analitik (AHP) merupakan suatu pendekatan yang biasanya digunakan untuk menganalisis kebijakan. Saaty dalam (Faletahan, 2009) mengemukakan bahwa tahapan analisis data sebagai berikut: (1) identifikasi sistem, (2) penyusunan hirarki, (3) membuat matriks perbandingan/komparasi berpasangan,(4) menghitung matriks pendapat individu,(5) menghitung pendapat gabungan, (6) pengolahan horizontal, (7) pengolahan vertikal dan (8) revisi. Adapun hasil analisis pada penelitian ini dapat dilihat pada uraian berikut.

a. Sintesis Bobot Pertimbangan tiap Informan.

Bobot pertimbangan (preferensi) masing-masing informan berbeda satu sama lainnya. Nilai bobot preferensi terbesar yaitu 0,5 yang berarti persentase preferensi yang diberikan yaitu sebesar 50%. Sedangkan bobot preferensi yang terkecil yaitu 0,05 yang berarti persentase persentase yang diberikan hanyalah sebesar 5%. Untuk lebih jelasnya bobot



pertimbangan tiap informan terhadap faktor - faktor pendukung aspek pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada tabel .

Dari tabel terlihat bahwa prioritas tertinggi faktor - faktor yang mempengaruhi aspek lingkungan pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan persepsi pelaku dari Bappeda 1 dan Setda yaitu degradasi lingkungan, pelaku dari Bappeda 2 yaitu faktor neraca sumberdaya alam, pelaku dari akademisi, praktisi, unsur DPRD dan tokoh masyarakat justru memilih potensi sumberdaya alam sebagai bobot preferensi tertinggi.

Menunjukkan bahwa pemberian bobot tertinggi dalam penentuan prioritas faktor-faktor yang mempengaruhi aspek sosial cenderung sama. Pelaku dari Bappeda 1, Bappeda 2, akademisi, praktisi dan unsur legislatif memilih keadilan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap aspek sosial dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan pelaku dari Setda memilih faktor menghargai perbedaan sebagai bobot pertimbangan tertinggi. Berbeda dengan pelaku dari tokoh masyarakat yang memilih rasa aman merupakan faktor yang mempunyai bobot tertinggi.

Tabel 4
Sintesis Bobot Pertimbangan tiap Informan dalam Aspek Lingkungan

No.	Pelaku	Faktor – faktor dalam Aspek Lingkungan		Bobot	Prioritas
				Preferensi	
1.	Bappeda 1	• Degradasi Lingkungan		0,50	1
		• Neraca SDA dan Lingkungan		0,33	2
		• Potensi SDA		0,17	3
2.	Bappeda 2	• Neraca SDA dan Lingkungan		0,43	1
		• Potensi SDA		0,33	2
		• Degradasi Lingkungan		0,24	3
3.	Setda	• Degradasi Lingkungan		0,56	1
		• Potensi SDA		0,33	2
		• Neraca Sumberdaya Alam dan Lingkungan		0,29	3
4.	Akademisi	• Potensi Sumberdaya Alam		0,38	1
		• Neraca SDAdan Lingkungan		0,33	2
		• Degradasi Lingkungan		0,29	3
5.	Praktisi	• Potensi SDA		0,38	1
		• Degradasi Lingkungan		0,33	2
		• Neraca SDAdan Lingkungan		0,29	3
6.	DPRD	• Potensi SDA		0,43	1
		• Neraca SDAdan Lingkungan		0,37	2
		• Degradasi Lingkungan		0,33	3
7.	Tokoh Masyarakat	• Potensi SDA		0,33	1
		• Degradasi Lingkungan		0,33	1
		• Neraca SDAdan Lingkungan		0,33	1

Sumber : Hasil Analisis, 2017

Tabel 5. Sintesis Bobot Pertimbangan tiap Informan dalam Aspek Sosial

No.	Pelaku	Faktor-faktor dalam Aspek Sosial	Bobot	Prioritas
			Preferensi	
1.	Bappeda 1	• Keadilan	0,47	1
		• Rasa Aman	0,32	2
		• Menghargai Perbedaan	0,16	3
		• Kesetaraan	0,05	4
2.	Bappeda 2	• Keadilan	0,38	1
		• Menghargai Perbedaan	0,29	2
		• Rasa Aman	0,20	3
		• Kesetaraan	0,009	4
3.	Setda	• Menghargai Perbedaan	1,00	1
		• Rasa Aman	0,71	2
		• Keadilan	0,42	3
		• Kesetaraan	0,14	4
4.	Akademisi	• Keadilan	0,26	1
		• Kesetaraan	0,26	1
		• Rasa Aman	0,26	1
		• Menghargai Perbedaan	0,23	2
5.	Praktisi	• Keadilan	0,29	1
		• Rasa Aman	0,25	2
		• Menghargai Perbedaan	0,25	2
		• Kesetaraan	0,14	3
6.	DPRD	• Keadilan	0,41	1
		• Rasa Aman	0,32	2
		• Kesetaraan	0,23	3
		• Menghargai Perbedaan	0,04	4
7.	Tokoh Masyarakat	• Rasa Aman	0,38	1
		• Keadilan	0,27	2
		• Kesetaraan	0,20	3
		• Menghargai Perbedaan	0,12	4

Sumber : Hasil Analisis, 2017.

Tabel 6

Sintesis Bobot Pertimbangan tiap Informan dalam Aspek Ekonomi

No.	Pelaku	Faktor-faktor dalam Aspek Ekonomi	Bobot	Prioritas
			Preferensi	
1.	Bappeda 1	• Pendapatan Masyarakat	0,36	1
		• Kesempatan Kerja	0,26	2
		• Pendapatan Daerah	0,22	3
		• Investasi	0,13	4
2.	Bappeda 2	• Pendapatan Masyarakat	0,31	1
		• Pendapatan Daerah	0,29	2
		• Investasi	0,20	3
		• Kesempatan Kerja	0,13	4
3.	Setda	• Kesempatan Kerja	0,44	1
		• Investasi	0,31	2
		• Pendapatan Masyarakat	0,25	3
		• Pendapatan Daerah	0,06	4
4.	Akademisi	• Pendapatan Masyarakat	0,27	1



		• Kesempatan Kerja	0,27	1
		• Investasi	0,24	2
		• Pendapatan Daerah	0,24	2
5.	Praktisi	• Pendapatan Masyarakat	0,28	1
		• Kesempatan Kerja	0,25	2
		• Pendapatan Daerah	0,25	2
		• Investasi	0,21	3
6.	DPRD	• Pendapatan Masyarakat	0,35	1
		• Kesempatan Kerja	0,29	2
		• Investasi	0,20	3
		• Pendapatan Daerah	0,12	4
7.	Tokoh	• Pendapatan Masyarakat	0,35	1
	Masyarakat	• Kesempatan Kerja	0,29	2
		• Pendapatan Daerah	0,20	3
		• Investasi	0,12	4

Sumber : Hasil Analisis, 2017

Dari Tabel diatas terlihat bahwa hampir sebagian besar informan memberikan bobot pertimbangan terbesar pada pendapatan masyarakat sebagai faktor yang berpengaruh pada aspek ekonomi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan pelaku dari Setda memilih kesempatan kerja sebagai faktor yang paling berpengaruh terhadap aspek sosial dalam pembangunan berkelanjutan.

b. Sintesis Bobot Pertimbangan Seluruh Informan

Tujuan dari perhitungan pendapat seluruh informan atau pertimbangan gabungan adalah untuk membentuk suatu matriks yang mewakili matriks - matriks pendapat individu yang ada.

Tabel 7
Sintesis Bobot Pertimbangan Seluruh Informan

No.	Aspek	Faktor-faktor yang Mempengaruhi	Bobot Preferensi Seluruh Responden	Persentase Preferensi (%)	Prioritas
1.	Lingkungan	• Degradasi Lingkungan	0,52	52,17	1
		• Neraca SDAdan Lingkungan	0,31	31,29	3
		• Potensi SDA	0,34	33,59	2
2.	Sosial	• Keadilan	0,32	32,13	1
		• Kesetaraan	0,15	14,68	4
		• Rasa Aman	0,29	29,10	2
		• Menghargai Perbedaan	0,20	20,38	3
3.	Ekonomi	• Pendapatan Masyarakat	0,31	31,01	1
		• Kesempatan Kerja	0,27	27,45	2
		• Investasi	0,20	20,49	3
		• Pendapatan Daerah	0,19	19,86	4
4.	Kelembagaan	• Komunikasi dan koordinasi	0,31	30,88	3
		• Partisipasi dan hak-hak publik	0,38	37,96	1
			0,31	31,16	2



bahwa apabila bobot preferensi informan digabungkan dan dibagi dengan jumlah keseluruhan informan (7 informan) akan menghasilkan persentase bobot yang berbeda dengan bobot persentase tiap individu. Untuk faktor - faktor yang mempengaruhi aspek lingkungan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ternyata persentase bobot preferensi informan sebesar 52,17 % memilih degradasi lingkungan sebagai prioritas pertama. Sedangkan untuk faktor yang mempengaruhi aspek sosial dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, bobot preferensi hampir merata, akan tetapi faktor keadilan merupakan prioritas tertinggi dengan persentase preferensi sebesar 32,13 %. Menurut pendapat responden secara keseluruhan dengan persentase preferensi sebesar 31,01 %, faktor pendapatan masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi tujuan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan dalam aspek kelembagaan, perhitungan bobot preferensi seluruh responden memberikan bobot terbesar (37,96%) pada faktor partisipasi dan hak-hak publik sebagai faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan

Kesenjangan Antara Persepsi dan Pemahaman *Stakeholder* dan Masyarakat, Dokumen Perencanaan dan Ketercapaian Indikator Pembangunan Berkelanjutan di Kota Sibolga

Sub bahasan terakhir pada penelitian ini yaitu mencoba mengidentifikasi ada/tidaknya kesenjangan/*gap* antara hasil penelitian pertama, kedua, dan ketiga. Hal ini berarti sub bab ini mencoba membahas apakah ada kesenjangan antara persepsi dan pemahaman *stakeholders* dan masyarakat di Kota Sibolga, prinsip pembangunan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan yang telah dianalisis sebelumnya dengan realita ketercapaian indikator pembangunan berkelanjutan di Kota Sibolga.

a. Kesenjangan Antara Persepsi *Stakeholder* dan Persepsi Masyarakat

Persepsi tentang pembangunan berkelanjutan menurut *stakeholder* dan masyarakat berbeda satu sama lainnya. Persepsi *stakeholder* tentang pembangunan berkelanjutan baik menurut pemahaman sendiri maupun berdasarkan struktur AHP memandang bahwa aspek lingkungan merupakan aspek terpenting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Walaupun terdapat perbedaan pendapat pada faktor - faktor yang mempengaruhi tercapainya pembangunan berkelanjutan tersebut. Menurut pemahaman sendiri, *stakeholder* memandang bahwa faktor neraca SDA merupakan faktor yang paling berpengaruh. Sedangkan hasil persepsi *stakeholder* dengan struktur AHP memandang bahwa faktor degradasi lingkungan yang paling berpengaruh

Tabel 8
Kesenjangan Antara Persepsi *Stakeholder* dan Persepsi Masyarakat tentang Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

No	Pemahaman <i>Stakeholder</i>	Preferensi <i>Stakeholder</i> pada Struktur AHP	Masyarakat
1	Lingkungan (Neraca SDA & lingkungan)	Lingkungan (Degradasi lingkungan)	Sosial (Keadilan)
2	Sosial (Kesetaraan)	Kelembagaan (Partisipasi & hak-hak publik)	Ekonomi (Pendapatan Masyarakat)
3	Ekonomi (Pendapatan daerah)	Ekonomi Pendapatan Masyarakat	Lingkungan (Potensi SDA)



4	Kelembagaan (Komunikasi & Koordinasi)	Sosial (Keadilan)	Kelembagaan (Komunikasi & Koordinasi)
---	---------------------------------------	-------------------	---------------------------------------

Sumber : Hasil Analisis, 2017.

Dari hasil persepsi antara *stakeholder* dan masyarakat juga memperlihatkan perbedaan dalam aspek tentang pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan di Kota Sibolga. *Stakeholder* memandang bahwa masyarakat sudah dilibatkan terhadap perencanaan di Kota Sibolga, sedangkan masyarakat memandang sebaliknya. Sehingga peneliti membuat kesimpulan bahwa di Kota Sibolga, pelibatan masyarakat dalam perencanaan belumlah maksimal dan Pemerintah Kota Sibolga haruslah mencari cara yang lebih baik untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan tersebut.

b. Analisis Kesenjangan Antara Dokumen Perencanaan dengan Kondisi Eksisting Di Kota Sibolga

Dokumen perencanaan yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya yaitu RPJMD Kota Sibolga Tahun 2016 - 2021. Analisis Kesenjangan yang diharapkan pada sub bab ini yaitu adanya *gap*/kesenjangan antara hal-hal yang diinginkan dalam dokumen perencanaan apabila dibandingkan dengan kenyataan yang ada .

Disebutkan dalam RPJMD Kota Sibolga Tahun 2016 - 2021, bahwa untuk mencapai sasaran pokok yang dimaksudkan dalam uraian RPJMD Kota Sibolga Tahun 2016 - 2021, maka pembangunan jangka menengah membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang segera diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda - beda, tapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya. Untuk mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka menengah tersebut, maka dibuatlah indikator makro pembangunan setiap tahapnya. Adapun indikator makro pembangunan yang akan dianalisis yaitu Tahun 2016 - 2021. Dari hasil analisis kesenjangan pada indikator tersebut dapat diketahui bahwa dari 25 indikator makro pembangunan Tahun 2016 terdapat 11 nilai kesenjangan yang positif (kondisi eksisting > target) dan 14 nilai kesenjangan negatif (kondisi eksisting < target). Akan tetapi apabila ditelaah nilai tersebut mempunyai dua indikasi yaitu nilai kesenjangan yang membutuhkan perhatian dari Pemerintah Kota Sibolga untuk perbaikan di masa yang akan datang dan nilai kesenjangan yang mengindikasikan keberhasilan program Pemerintah Kota Sibolga.

Pada indikator pembangunan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi terlihat bahwa indikator laju pertumbuhan ekonomi dan daya beli memerlukan perhatian khusus untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akan tetapi dalam indikator kesejahteraan sosial dan kesehatan, hampir semua indikator memerlukan perhatian yang lebih baik di masa yang akan datang. Lain halnya pada indikator pembangunan kemiskinan dan keuangan daerah yang memperlihatkan adanya keberhasilan program pemerintah dengan nilai-nilai kesenjangan yang positif. Akan tetapi nilai indikator indeks pembangunan manusia di Kota Sibolga masih dibawah target yang diharapkan.

Apabila hasil Analisis Isi (*content analysis*) dari RPJMD Kota Sibolga Tahun 2016 – 2021 dibandingkan dengan hasil persepsi *stakeholder* yang *nota bene* merupakan pelaku



dibalik penyusunan dokumen tersebut, maka terdapat kesenjangan seperti yang ditunjukkan pada Tabel di bawah ini

Tabel 9
Kesenjangan Antara Hasil Persepsi Stakeholder dengan Hasil Analisis Isi pada RPJMD Kota Sibolga Tahun 2016-2021

Persepsi		Hasil Analisis Isi RPJMD Kota Sibolga Tahun 2016-2021	
Pemahaman Stakeholder	Preferensi Stakeholder pada Struktur AHP		
1. Lingkungan & lingkungan)	(Neraca SDA 1. Lingkungan (Degradasi lingkungan)	1. Sosial (Menghargai perbedaan)	
2. Sosial (Kesetaraan)	2. Kelembagaan (Partisipasi & hak-hak publik)	2. Ekonomi (Pendapatan masyarakat)	
3. Ekonomi (Pendapatan daerah)	3. Ekonomi (Pendapatan masyarakat)	3. Kelembagaan (Komunikasi & Koordinasi)	
4. Kelembagaan (Komunikasi & koordinasi)	4. Sosial (Keadilan)	4. Lingkungan (Neraca SDA & Lingkungan)	

Sumber : Hasil Analisis, 2017.

c. Analisis Kesenjangan Dalam Ketercapaian Indikator Pembangunan Berkelanjutan di Kota Sibolga

Hasil analisis pencapaian indikator pembangunan berkelanjutan di Kota Sibolga yang dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas (Sumatera Utara) menghasilkan nilai - nilai indeks komposit. Dari nilai indeks komposit tersebut maka diketahui bahwa ada 3 tema indikator pembangunan berkelanjutan yang mempunyai nilai indeks komposit yang lebih tinggi daripada nilai indeks komposit Provinsi Sumatera Utara.

Nilai indeks komposit tersebut yaitu pada tema pendidikan, tema kesehatan, dan tema sumberdaya air. Akan tetapi apabila hasil analisis ini digabungkan dengan hasil analisis persepsi dari *stakeholders* mengenai urutan prioritas faktor yang mempengaruhi pembangunan berkelanjutan dan hasil Analisis Isi pada RPJMD Kota Sibolga Tahun 2016 - 2021, maka terdapat 6 indikator pembangunan berkelanjutan faktual yang sesuai.

Tabel 10
Kesenjangan Antara Hasil Persepsi Stakeholder, Hasil Analisis Isi RPJMD Kota Sibolga Tahun 2016 - 2021 dengan Realita Ketercapaian Indikator Pembangunan Berkelanjutan di Kota Sibolga

Persepsi		Hasil Analisis Isi RPJMD Kota Sibolga Tahun 2016-2021	Realita Ketercapaian Indikator pembangunan Berkelanjutan
Pemahaman Stakeholder	Preferensi Stakeholder pada Struktur AHP		
1. Lingkungan (Neraca SDA & lingkungan)	1. Lingkungan (Degradasi lingkungan)	1. Sosial (Menghargai perbedaan)	1. Sosial (Rasa Aman)
2. Sosial (Kesetaraan)	2. Kelembagaan	2. Ekonomi (Pendapatan	2. Lingkungan (Potensi SDA)
3. Ekonomi (Pendapatan			



daerah)	(Partisipasi & hak-hak publik)	& masyarakat)	3. Kelembagaan (Partisipasi & Hak-hak publik)
4. Kelembagaan (Komunikasi & koordinasi)	3. Ekonomi (Pendapatan masyarakat)	3. Kelembagaan (Komunikasi & Koordinasi)	
	4. Sosial (Keadilan)	4. Lingkungan (Neraca SDA & Lingkungan)	

Sumber : Hasil Analisis, 2017

Adapun kesenjangan yang terjadi antara hasil - hasil penelitian secara lengkapnya. Urutan prioritas prinsip pembangunan berkelanjutan ternyata berbeda-beda untuk setiap obyek penelitian. Penentuan faktor - faktor yang paling berpengaruh pada setiap aspek pembangunan berkelanjutan juga berbeda pada setiap hasil penelitian.

Tabel 11
Hasil Output Penelitian

Pemahaman Stakeholder	Persepsi		Hasil Analisis Isi		Realita Ketercapaian
	Preferensi	Masyarakat	RPJMD		Indikator pembangunan
	Stakeholder pada Struktur AHP		Kota Sibolga Tahun 2016-2021		Berkelanjutan
1. Lingkungan (Neraca SDA & lingkungan)	1. Lingkungan (Degradasi lingkungan)	1. Sosial (Keadilan)	1. Sosial (Menghargai perbedaan)	1. Sosial (Rasa Aman)	1. Lingkungan (Potensi SDA)
2. Sosial (Kesetaraan)	2. Kelembagaan (Partisipasi & hak-hak publik)	2. Masyarakat	2. Ekonomi (Pendapatan masyarakat)	2. Kelembagaan (Komunikasi & Koordinasi)	3. Kelembagaan (Partisipasi & Hak-hak publik)
3. Ekonomi (Pendapatan daerah)	3. Ekonomi (Pendapatan masyarakat)	3. Lingkungan (Potensi SDA)	3. Kelembagaan (Komunikasi & Koordinasi)	4. Lingkungan (Neraca SDA & Lingkungan)	
4. Kelembagaan (Komunikasi & Koordinasi)	4. Sosial (Keadilan)				

Sumber : Hasil Analisis, 2017

KESIMPULAN

Dari uraian bab-bab terdahulu dapat, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. *Stakeholder* di Kota Sibolga telah memahami prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memberikan definisi pembangunan berkelanjutan menurut pemahaman sendiri, yang terdiri dari proses pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan hasil dari pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. *Stakeholder* berpandangan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan adalah aspek lingkungan (faktor neraca SDA dan lingkungan), aspek sosial (faktor kesetaraan), aspek ekonomi (faktor pendapatan daerah) dan aspek kelembagaan (faktor komunikasi dan koordinasi). Secara hierarkhi



- aspek-aspek pembangunan berkelanjutan menurut *stakeholder* adalah aspek lingkungan (faktor degradasi lingkungan), aspek kelembagaan (partisipasi dan hak-hak publik), aspek ekonomi (pendapatan masyarakat), dan aspek sosial (faktor keadilan). Menurut persepsi masyarakat, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan adalah aspek sosial (faktor keadilan), aspek ekonomi (faktor pendapatan masyarakat), aspek lingkungan (faktor potensi SDA) dan aspek kelembagaan (faktor komunikasi & koordinasi).
2. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan terdapat di dalam Dokumen Perencanaan Kota Sibolga. Dalam RPJMD Kota Sibolga Tahun 2016-2021 terdapat prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang meliputi aspek sosial (faktor menghargai perbedaan), aspek ekonomi (faktor pendapatan masyarakat), aspek kelembagaan (faktor komunikasi dan koordinasi) dan aspek lingkungan (faktor neraca SDA dan Lingkungan).
 3. Pendidikan, kesehatan, dan sumberdaya air adalah tiga indikator pembangunan berkelanjutan yang tertinggi dicapai oleh Kota Sibolga. Berdasarkan empat aspek pembangunan pembangunan berkelanjutan, Kota Sibolga telah mencapai tiga aspek, yaitu aspek sosial (faktor rasa aman), aspek lingkungan (faktor potensi SDA), dan aspek kelembagaan (faktor partisipasi dan hak-hak publik).
 4. Terdapat kesenjangan mengenai persepsi, prinsip-prinsip, dan indikator pembangunan berkelanjutan diantara masyarakat, *stakeholder*, dan yang terdapat dalam dokumen perencanaan Kota Sibolga. Kesenjangan juga terjadi antara indikator yang terdapat dalam dokumen perencanaan dengan realitas ketercapaian indikator pembangunan berkelanjutan di Kota Sibolga. Penyebabnya adalah pembangunan berkelanjutan belum menjadi *mainstreaming* atau pengarusutamaan yang diterapkan serta menjiwai dalam dokumen perencanaan di Kota Sibolga.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Sibolga. Kota Sibolga Dalam Angka 2016 Sibolga: Kerjasama Bappeda Kota Sibolga dengan BPS Kota Sibolga.
- Bratakusumah DS. 2011. Paradigma Pembangunan. Bahan Mata Kuliah Perencanaan Wilayah Partisipatif. Bogor: Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ed ke-3. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hasibuan, I., Siregar, R. T., Manullang, M., & Damanik, S. E. (2020). Interaksi Desa Kota Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Simalungun (Studi Kasus Di Desa Perbatasan). *Jurnal Regional Planning*, 2(2), 79-88
- Nizar, A., Siregar, R. T., Damanik, S. E., & Purba, E. (2019). Pengaruh Ketersediaan Prasarana Dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Terhadap Harga Jual Perumahan Dalam Pengembangan Wilayah Kota Pematangsiantar. *Jurnal Regional Planning*, 1(2), 108-121
- Prasetyia, F., & Wulandari, F. (2009). Grand Design Perencanaan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dalam Upaya Mencapai Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Malang. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 3(1).
- Pusparani, I. G., Wibowo, T. A., & Hermawan, K. T. (2022). Participative development in developing the creative economy in Cirebon City. In *Acceleration of Digital Innovation & Technology towards Society 5.0* (pp. 301-310). Routledge.



- Purba, R. T., Manullang, M., Siregar, R. T., & Damanik, S. E. (2019). Dampak Relokasi Pusat Pemerintahan Terhadap Efisiensi Pelayanan Masyarakat Dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Simalungun. *Jurnal Regional Planning*, 1(1), 54 –. <https://doi.org/10.36985/jrp.v1i1.579>
- Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Sibolga Tahun 2017. Sibolga.
- Resume RPJMD Kota Sibolga Tahun 2016-2021. Sibolga.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jarkarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Rozikin, M. (2012). Analisis pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kota Batu. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 2(2), 219-243.
- Rustiadi E, Saefulhakim S, Panuju DR. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sagala SMW. 2009. *Persepsi Masyarakat tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga Selama Kehamilan di Lingkungan 03 Kelurahan 2 Kecamatan Medan Belawan [skripsi]*. Medan: Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.
- Saragih, B. S., Siregar, R. T., Manullang, M., & Matondang, S. (2020). Peranan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Nagori Nagur Usang Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun. *Jurnal Regional Planning*, 2(1), 1-13
- Setiadi, R., Jawoto, S., Sophianingrum, M., & Rosalia, D. (2008). Indikator Pembangunan Berkelanjutan Kota Semarang. *Riptek*, 2(2), 1-6.
- Simanjuntak, D. H., Siregar, R. T., Manullang, M., & Damanik, S. E. (2021). Potensi Ekonomi Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Regional Planning*, 3(1), 1-15
- Simatupang, B., Silalahi, M., Sihaloho, A. N., & Ginting, M. (2021). Analisis Sektor Unggulan Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Pembangunan Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Regional Planning*, 3(2), 97-109.
- Siregar, M. A. N., Manullang, M., Siregar, R. T., & Damanik, S. E. (2019). Dampak Perusahaan Kelapa Sawit PTPN - IV Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dalam Pembangunan Wilayah Di Desa Kedai Damar Kecamatan Pabatu Kabupaten Serdang Badagei. *Jurnal Regional Planning*, 1(1), 39 –. <https://doi.org/10.36985/jrp.v1i1.578>
- Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen). Jakarta.

